

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Era otonomi daerah ini, pemerintah khususnya di masing-masing provinsi di Indonesia dituntut untuk bisa mandiri dalam menjalankan perekonomiannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di wilayah masing-masing, dengan berbagai regulasi yang ada, maupun dengan tata cara penyelesaian masalah yang lain, dan inilah yang disebut juga otonomi daerah. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Kemajuan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat pada perubahan struktur ekonomi. Hal ini terjadi akibat dari pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat sehingga akan berpengaruh pada tingkat pola konsumsi masyarakat (Sudarsono, 2010). Setiap daerah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi sangat memungkinkan masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih banyak seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan standar hidup. Peningkatan standar hidup dapat dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, papan dan serta kehidupan spiritual yang baik.

Pemanfaatan sumber daya serta potensi yang dimiliki suatu daerah dapat meningkatkan perkembangan ekonominya. Adanya kebijakan desentralisasi untuk

daerah memicu munculnya otonomi bagi pemerintahan di Papua Barat. Daerah otonomi pada dasarnya mengatur serta mengurus dirinya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua No 21 Tahun 2001, memiliki tujuannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan serta kemajuan daerah.

Otonomi daerah menjadi angin segar dalam memberikan arah negara ke arah kemajuan. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk membangun Indonesia sesuai dengan peran masing-masing. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembangunan umum dan hubungan diplomatik internasional, sementara pemerintah daerah fokus pada pengembangan daerah mereka sampai mencapai kemajuan.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan alat yang diterapkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat, termasuk menciptakan kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah daerah, yang membuka peluang kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal (Arsyad, 1999). Intinya, pembangunan daerah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, menyebarkan pendapatan secara lebih merata, meningkatkan potensi sumber daya yang ada, serta mengalihkan peran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Namun, perbedaan karakteristik dan potensi sumber daya di kedua sektor tersebut sering mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya pembangunan ekonomi daerah oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan potensi dan karakteristik sumber daya yang tersedia.

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator dalam pembangunan ekonomi daerah yang membantu dalam menyusun kebijakan prioritas untuk memaksimalkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah memiliki dampak signifikan terhadap permintaan produk dan jasa. Meningkatnya aktivitas ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal, wilayah tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan melibatkan tenaga kerja lokal dalam produksi atau perdagangan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kekayaan daerah serta penciptaan lapangan kerja. Perkembangan ini secara langsung akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Sektor-sektor ekonomi utama yang mempengaruhi PDRB meliputi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, serta sektor listrik, gas, dan udara. Pemerintah daerah dapat menggunakan sektor-sektor ini sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah.

Pembangunan negara terutama ditopang oleh pembangunan ekonomi, dan kajian pembangunan ekonomi sering kali mengemukakan empat dimensi utama: penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan, perubahan atau transformasi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Keempat hal tersebut memiliki prasyarat yang bersifat berkelanjutan, yaitu perubahan struktural. Dari keempat hal tersebut, sangat sedikit yang mencirikan proses perubahan struktur dalam perekonomian, seperti sektor primer pertanian yang semakin berkurang bagiannya, sektor sekunder industri, perdagangan yang semakin bertambah, dan sektor tersier jasa yang bagiannya memberikan kontribusi yang semakin besar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang pembangunannya meliputi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor-sektor yang lebih produktif telah menyebabkan pencapaian, baik di tingkat nasional maupun daerah, semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari variabel-variabel seperti pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, nilai tambah yang berbanding lurus dengan sebelumnya, dan struktur perekonomian daerah pada suatu periode. Sektor-sektor perekonomian tersebut saling terkait karena adanya struktur perekonomian yang mendasari suatu daerah. Suatu daerah dapat maju apabila didukung oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang tinggi dan sumber daya alam yang memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki potensi atau prospek yang besar untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi yang saat ini diprioritaskan di Indonesia adalah pembangunan industri yang berorientasi pada pengembangan industri pengolahan bahan pertanian dan pengembangan industri, perdagangan, dan jasa yang dapat berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kualitas manusia menjadi penggerak serta sumber daya yang efisien dalam suatu pembangunan. Investasi dalam pendidikan secara mutlak dibutuhkan, maka dari itu pemerintah harus bisa menyediakan sarana dan sistem pendidikan yang berguna dan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat yang bermutu dan semakin baik akan berdampak pada peningkatan kinerja dan mendorong kegiatan perekonomian serta meningkatkan kondisi perekonomian daerah. Selain dilihat dari kualitas manusianya, perekonomian suatu

daerah dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi pada Daerah-Daerah yang menerima Otonomi Khusus dalam Persen(%).

| Provinsi         | 2018        | 2019        | 2020         | 2021        | 2022        | Rata-rata   |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Aceh             | 4,61        | 4,14        | -0,37        | 2,79        | 4,21        | -37         |
| DKI Jakarta      | 6,17        | 5,82        | -2,39        | 3,56        | 5,25        | -239        |
| Yogyakarta       | 5,49        | 5,96        | -2,42        | 5,16        | 5,12        | -242        |
| Papua Barat      | 6,25        | 2,66        | -0,76        | -0,51       | 2,01        | -63.5       |
| Papua            | 7,32        | -15,74      | 2,39         | 15,11       | 8,97        | -1547       |
| <b>Indonesia</b> | <b>5,17</b> | <b>5,02</b> | <b>-2,07</b> | <b>3,69</b> | <b>5,31</b> | <b>-207</b> |

Sumber : Data diolah, 2023.

Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi antara daerah-daerah yang menerima hak otonomi khusus, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi papua barat dalam kondisi yang tidak stabil bila dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan kondisi eksternal maupun kondisi internal daerah. Pendapatan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif (bisa naik dan bisa juga turun). Kondisi perekonomian daerah yang masih tertinggal belum mencapai *steady state* dimana perekonomian sudah berada pada kondisi stabil dan tidak mudah terguncang. Artinya pertumbuhan ekonomi Papua Barat masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Provinsi Papua Barat masih tergolong daerah tertinggal, sehingga dalam hal ini pemerintah harus dapat menyediakan kebutuhan dan sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas dan menjalankan perekonomian. Selama mendapatkan sarana serta jaminan kesehatan yang baik dirancang dan disediakan oleh pemerintah melalui pengeluaran. Pengeluaran kesehatan semakin tinggi maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Diharapkan berdampak juga pada masyarakat dapat bekerja optimal sebagai *human capital*. Kemampuan masyarakat terhadap kinerja dapat mendorong perekonomian dan meningkatkan kondisi perekonomian daerah.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Papua Barat, tahun 2020-2022 (%)

| Kabupaten/Kota     | 2020         | 2021         | 2022        |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| Fakfak             | -2.95        | 0.97         | 2.24        |
| Kaimana            | -2.83        | -2.10        | 1.12        |
| Teluk Wondama      | -3.22        | 1.09         | 3.20        |
| Teluk Bintuni      | 1.06         | -2.30        | 2.02        |
| Manokwari          | -6.27        | 3.69         | 2.06        |
| Sorong Selatan     | -3.67        | 3.47         | 5.71        |
| Sorong             | -2.50        | 1.62         | 2.12        |
| Raja Ampat         | -2.28        | 11.79        | 11.97       |
| Tambrau            | -2.41        | 0.52         | 3.17        |
| Maybrat            | -1.25        | 1.16         | 2.47        |
| Manokwari Selatan  | -2.82        | 1.23         | 1.98        |
| Pegunungan Arfak   | 6.07         | 4.55         | 13.97       |
| Kota Sorong        | -3.24        | -1.52        | 1.88        |
| <b>Papua Barat</b> | <b>-0,76</b> | <b>-0,51</b> | <b>2,01</b> |

Sumber Data: BPS Provinsi Papua Barat 2022

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami fluktuatif, bisa meningkat dan juga bisa mengalami penurunan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat menimbulkan tanda tanya besar bagi pemerintah yang sekiranya kurang efisien dan efektif dalam menjalankan pembangunan ekonomi daerah. Untuk itu, usaha pemerintah dilakukan agar tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah berperan dalam menciptakan harmonisasi antar daerah melalui kebijakan pemerintah (Azwar, 2016).

Kebijakan ekonomi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama: kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua kebijakan ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi, suku bunga, dan keseluruhan aktivitas ekonomi. Kebijakan ini biasanya dijalankan oleh bank sentral. Sedangkan Kebijakan fiskal berkaitan dengan keputusan pemerintah mengenai pengeluaran dan penerimaan, yang mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Menurut gagasan Keynes, kebijakan fiskal harus digunakan secara berlawanan dengan siklus ekonomi: pemerintah harus meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak selama resesi untuk merangsang perekonomian, dan sebaliknya, mengurangi pengeluaran dan/atau meningkatkan pajak selama periode ekspansi untuk mencegah overheating. Dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal secara efektif, pemerintah dapat mengarahkan perekonomian menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas.

Implementasi yang baik dari kedua kebijakan ini dapat membantu mengatasi fluktuasi ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Papua Barat sebagai salah satu provinsi yang menjalankan otonomi daerah merupakan daerah yang mempunyai keragaman sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Faktanya, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat masih belum merata. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi berada dalam kondisi yang tidak stabil. Dengan demikian, maka penulis memutuskan melakukan penelitian dengan judul; “Analisis Pola Struktur Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana potensi dan struktur ekonomi Papua Barat dapat dipetakan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share*, serta bagaimana kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Barat?
- 1.2.2 Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat? .

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur dan kondisi ekonomi Provinsi Papua Barat, serta menganalisis bagaimana perubahan dalam struktur dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat. Tujuan khususnya adalah:

- 1.3.1 Melakukan analisis terhadap pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat.
- 1.3.2 Mengidentifikasi dan menganalisis dampak simultan dari 17 sektor ekonomi yang ada di Papua Barat terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

#### **1.4.1 Manfaat secara Teoritik**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, khususnya terkait dengan pola struktur ekonomi dan dampak pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat secara Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk

meratakan pembangunan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi ekonomi daerah mereka, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup di wilayah tersebut.